Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Seberang Teluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Rahmita Budiartiningsih1, Selly Prima Desweni2, Bunga Chintia Utami3, Ando Fahda Aulia4

1234 Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km 12.5, Pekanbaru, 28293, Indonesia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Article Information |  | **ABSTRACT** |
| Received: Revised: Accepted: March 00, 00Available online:  | This research is based on the implementation of the Hope Family Program (HFP) as an alternative policy in reducing poverty in Indonesia, including Seberang Taluk Hilir Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The problem formulations and objectives of this study are: 1) how is the influence of HFP in overcoming poverty in Seberang Taluk Hilir Village, 2) the extent of the influence of the HFP program in overcoming poverty in Seberang Taluk Hilir Village. The population and samples of this study was 50 households who received direct assistance. This research is using Qualitative method with non-experimental.Data collection was carried out by means of observation, in-depth interviews and documentation. The data analysis technique uses an interactive model through the process of: data reduction, data presentation and conclusion drawing.The results showed that there was a very big influence with the HFP program for the survival of the beneficiary, a change in consumption patterns and the ability to meet their daily needs. The achievement of the HFP program objectives for household recipients of assistance, especially in terms of education and health are getting better. Strengthened by management and supervision by household facilitators so that beneficiary communities can manage cash assistance properly.There needs to be a government policy to improve service quality, especially the number of HFP facilitators who are still lacking, so that the role of the assistants is still not maximal in serving and supervising the implementation of the HFP program in the village of Seberang Taluk Hilir. |
| Keywords |
| Facilitator, Government, Household, Poverty |
| Correspondence |
| Phone: +6285274774358E-mail: selly.prima@gmail.com |

# PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan menjadi prioritas utama kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang tertuang dalam pembukaan undang – undang dasar 1945.Namun untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara menyeluruh tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah.Masih rendahnya pendapatan dan tingginya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat seolah menjadi tugas yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah.Hal inilah yang menjadi awal kenapa tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi.

Persoalan kemiskinan masih menjadi permasalahan dasar yang harus dikendalikan oleh pemerintah. Kemiskinan akan berdampak di segala sisi kehidupanbaik kondisi ekonomi, kondisi politik dan sosial serta lainnya. Salah satu faktor yang menunjukkan tingginya kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tingginya tingkat pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dibagai menjadi tiga cluster dan provinsi Riau berada pada cluster kemiskinan rendah bersama 17 provinsi lainnya dengan nilai ratarata indeks kedalaman (P1) 0.96, indeks keparahan (P2) 0.19 dan presentase penduduk miskin 7.41% (Ferezagia, 2018).

Masih tingginya angka pengangguran menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius(Arifin et al., 2016).Sulit untuk mendapatkan pendapataan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari – hari. Di sisi lain, pencapaian dan kemampuan masyarakat dalam menikmati fasililitas pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM juga masih rendah. Masih banyak masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan yang layak sehingga berdampak pada rendahnya pengetahuan dan keterampilan dan tidak mampu bersaing di dunia kerja. Disisi lain, permasalahan peningkatan jumlah penduduk yang terus berkembang setiap tahunnya tapi tidak diiringi dengan peningkatan ketersediaan sumber daya sehingga kebutuhan manusia pun tidak terpenuhi.

Masih tingginya tingkat kemiskinan disini lebih disebabkan oleh rendahnya produktivitas kerja. Rendahnya produktivitas kerja berdampak pada ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari.Hal ini sangat tepat rasanya bila dilihat dari lapangan pekerjaan utama di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang di dominasi pada sectorpertanian.Hampir secara keseluruhan, masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi berprofesi sebagai petani dengan penghasilan menengah ke bawah.Sehingga berdampak pada daya beli masyarakat rendah dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dampak dari kemiskinan ini tentu sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi, terutama berkaitan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan. Akibat dari rendahnya pendapatan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat untuk menempuh pendidikan yang tinggi, disisi lain kebutuhan akan layanan kesehatan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak memprioritaskan kondisi kesehatan terutama bagi ibu dan balita. Minimnya akses dan pemahaman akan pendidikan dan kesehatan inilah yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang rendah. Tenaga kerja yang dimiliki tidak memiliki pengetahuan dan skill sehingga tidak mampu bersaing dalam dunia kerja, dan pada akhirnya masyarakat tidak mampu terlepas dari lingkaran kemiskinan.

Seperti yang kita lihat pada salah satu desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Desa Seberang Taluk Hilir yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah.Dari data yang diperoleh tahun 2019, lapangan pekerjaan utama di dominasi oleh sektor pertanian. Dari jumlah penduduk yang mendiami desa Seberang Taluk Hilir yang totalnya berjumlah 972 jiwa, profesi sebagai petani penggarap yakni sebesar 21,09 persen. Sedangkan pekerjaan paling sedikit yaitu sebagai PNS ataupun aparat pertahanan dan keamanan Negara yakni sebesar 0,3 persen.

Tingginya angka kemiskinan ini, seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah setempat dalam mengatasinya.Sudah tentu banyak kegiatan / perencanaan yang telah dilakukan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu solusi kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengatasi kemiskinan yaitu pemberian bantuan secara langsung kepada masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan bantuan langsung yang sampai sekarang masih berjalan yaitu dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH).

Kabupaten Kuantan Singingi juga telah menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH).Dibawah naungan Dinas Sosial, hampir seluruh desa yang ada di kabupaten Kuantan Singingi telah menjalankan Program Keluarga Harapan termasuk Desa Seberang Taluk Hilir.Program PKH terus ditingkatkan sebagai upaya langsung untuk melindungi dan membantu keberlangsungan hidup dari masyarakat miskin. Karena memang, sasaran utama dari bantuan PKH itu sendiri adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan berbagai kriteria yang ditetapkan seperti : memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0 – 15 tahun, ibu hamil, melewati masa nifas, lansia dan disabilitas. Fokus utama dari program PKH itu sendiri adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya utama.

Hal ini sejalan dengan konsep kemiskinan menurut Todaro (2004), yang menjelaskan bahwa kemiskinan absolut apabila pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan atau pendapatan yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal antara lain : pangan, sandang, kesehatan, perumahan, pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Todaro juga menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia adalahfaktor yang berperan penting - bahkan lebih penting dari kuantitas - dalam menentukan besar kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara(Surgawati, 2020). Konsep ini memang sejalan dengan data di lapangan yang ditemui di Desa Seberang Taluk Hilir bahwa masih banyak penduduk yang masih berada pada kondisi kemiskinan, dengan tingkat pendapatan rendah, pendidikan rendah.

Mengingat begitu besarnya peran PKH sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah maka penulis tertarik untuk meneliti peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Seberang Taluk Hilir. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah kemiskinan di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi menjadi pokok permasalahan utama yang masih belum bisa terpecahkan sampai sekarang. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1.Bagaimana peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan di Desa Seberang Taluk Hilir?

2.Bagaimana dampak pelaksanaan Program Pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan di Desa Seberang Taluk Hilir?

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana peran Program. Adapun tujuan dari pembuatan penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan di Desa Seberang Taluk Hilir
2. Dampak pelaksanaan Program Pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan di Desa Seberang Taluk Hilir

Secara teoritis, kemiskinan menurut konsep ekonomi adalah kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Meskipun kemiskinan menurut konsep ekonomi dapat diukur dari kecukupan pendapatan, kemiskinan juga dapat diidentifikasi dari ciri-ciri yang melekat pada penduduk miskin tersebut. Ciri tersebut antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku penduduk yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat dirubah, rendahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya produktifitas, dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan(Todaro, 2004).

Penjeasan konsep ekonomi di atas menunjukkan bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Dalam hal perkiraan pendapatan tersebut harus masuk kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup layak. Bila sekiranya tingkat pendapatan seseorang atau keluarga tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin.Banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang berada pada kondisi kemiskinan baik itu dari sisi kemampuan dan usaha yang dimiliki, faktor keturunan dan lingkungan juga memberikan andil tersendiri terhadap kondisi kemiskinan seseorang.

Kondisi ini menjadi salah satu kategori / kriteria yang menentukan keluarga penerima PKH.Sebagai catatan bagi pemerintah, masyarakat yang sesuai dengan kategori penerima PKH berhak untuk menerima bantuan tunai setelah namanya tercantum dalam kartu PKH. Calon penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, maka mereka harus :

1. Melanjutkan sekolah anak usia 7 – 15 tahun serta anak usia 16 – 18 tahun tetapi belum selesai pendidikan dasar wajib 9 tahun, dan perkembangan belajar mereka akan dicatat dan dipantau oleh Dinas Sosial setempat
2. Membawa anak usia 0 – 6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan yang telah dijelaskan dalam PKH dan kemudian pemerintah stempat berkewajiban untuk mencatat setiap pelayanan kesehatan yang dilakukan
3. Untuk ibu hamil, hatus memeriksakan diri dan janinnya ke fasislitas kesehatan yang tersedia sesuai prosedur PKH dan pemerintah yang berwenang wajib untuk mencatat setiap pelayanan yang dilakukan

Tujuan umum pelaksanaan PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan serta mampu memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun tujuan program PKH :

1. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
3. Menciptakan perubahan prilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan social
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan
5. Mengenalkan tentang produk dan jasa keuangan formal kepada PKM

Jadi sasaran dari PKH ini adalah masyarakat dengan golongan pendapatan sangat rendah. Tujuan tersebut sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan konsep pencapaian target MDGs (Pedoman Umum PKH, 2008). PKH secara langsung dapat memberikan dampak berupa berkurangnya beban pengeluaran, dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat(Takaredase, 2019). Selanjutnya dalam Pedoman umum PKH tahun 2008, dijelaskan tujuan PKH secara khusus yaitu :

a. Meningkatkan kondisi sosial RTSM

b. Meningkatkan taraf pendidikan anak – anak RTSM

c. Meningkatkan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil, ibu nifas dan anak – anak di bawah 6 tahuan dari RTSM

d. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM

Berdasarkan Petunjuk Teknis PKH tahun 2019 selanjutnya, peran dari Kordinator Kabupaten / Kota khusus terkait penyaluran PKH adalah :

1. Mengkoordinasikan pengelolaan data / dokumen terkait hasil validasi calon KPM PKH, hasil verifikasi komitmen komponen PKH, hasil pemutakhiran KPM PKH, realisasi penyaluran bantuan PKH serta data / dokumen PKH lainnya di Kabupaten / Kota lokasi tugas
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan PKH serta tindak lanjut pelaporan rekonsiliasi realisasi penyaluran bantuan PKH pada seluruh kecamatan

Sejalan denganpenelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ekardo(2014) tentang program PKH yang dilakukan di Nagari Lagan Hilir Punggasan Kabupaten Pesisir Selatan memberikan efek positif dalam mengatasi permasalah ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 ini menunjukkan bahwa Program PKH dirasa efektif dalam menanggulangi permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin jika dilihat dari tujuan program PKH yang di gagas oleh kementrian social tersebut.

Menurut Suleman (2017), dalam penelitiannya menyatakan bahwa program PKH bersifat meberikan bantuan pada RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah ke masyarakat. Dari temuan di ketahui bahwa program PKH telah memberikan kemudahan pada masyarakat miskin dalam menyediakan layanan pendidikan untuk anak, kemampuan untuk membayar biaya sekolah.Bantuan langsung yang disampaikan diharapkan menjadi peran top down dari pemerintah ke masyarakat dalam bentuk bantuan tunai, meskipun belum secara maksimal dalam memberikan dampak langsung dalam memaksimalkan pemenuhan kebutuhan.

**METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan desain non – eksperimental.Artinya, peneliti tidak melakukan intervensi tehadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).Penelitian ini hanya mengukur dampak dari PKH yang telah terjadi sebelum penelitian dilakukan dan tidak disusun pada saat awal pelaksanaan penelitian ini.Jadi tidak ada manipulasi dan tidak juga mempengaruhiobjek penelitian.

Sumber data yang dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informasi yang bersumber dari Tim PKH di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, rumah tangga peserta PKH, aparat desa, pendamping PKH, petugas puskesmas, tokoh masyarakat, tenaga kependidikan dll. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti yang diperoleh dari sumber tertulis seperti sumber buku profil kabupaten, data BPS, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara pengamatan intensif (observation), wawancara mendalam (in depth interview), teknik dokumentasi dan telaah kepustakaan. Sugiyono mengatakan teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman atau disebut Model Interaktif yaitu melalui proses : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk mengukur keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis kuantitatif menggunakan teknik pengukuran data model ordinal dengan memberikan bobot nilai untuk setiap instrument data (Hermawan, 2019).

Untuk menjamin kebenaran data (credibility), memperoleh relativitas kesamaan data pada situasi lain yang lebih tinggi (transferability) dan konsistensi yang sesuai di setiap proses dengan kondisi dilapangan maka teknik keabsahan data yang dilakukan yaitu :

1. Teknik uji kredibilitas (kebenaran data yang digunakan dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber (triangulasi sumber) menggunakan berbagai cara (triangulasi teknik) dalam berbagai kondisi waktu (triangulasi) waktu agar diperoleh data yang lebih objektif.
2. Teknik uji transferability Merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kebenaran hasil penelitian dengan cara memberikan uraian yang lebih terperinci, jelas dan sistematis serta dapat dipercaya. Dengan teknik ini dapat dilihat bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain dengan karakteristik yang sama.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi suatu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan.Penerapan kegiatan tersebut hampir merata di seluruh desa yang ada di kabupaten Kuantang Singingi termasuk desa Seberang Taluk Hilir. Terbukti dari temuan yang diperoleh di lapangan ada tiga desa penerima bantuan dana PKH.

Pemberian bantuan diutamakan pada keluarga yang tergolong dalam RTSM sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah daerah, dibuktikan dengan kondisi dan keadaan peserta PKH secara nyata dengan terjun langsung ke tempat tinggal para peserta. Jadi dapat dikatakan antara satu peserta PKH dengan peserta PKH lainnya tidak akan memperoleh besaran dana bantuan PKH yang sama. Misalnya untuk dana kesehatan masing – masing anak balita memperoleh bantuan sebesar 250.000 rupiah/bulan, ibu hamil 250.000 rupiah/bulan. Di bidang pendidikan diberikan untuk bantuan anak SD sebesar 75.000 rupiah/bulan, biaya SMP 125.000 rupiah/bulan, SMA sebesar 166.000/bulan.

Sedangkan untuk lansia, disabilitas dan cacat berat masing – masing akan memperoleh bantuan sebesar 600.000 rupiah yang diterima per 3 bulan. Metode penyaluran dana bantuan nanti yaitu pemberian biasanya dilakukan per tiga bulan masing – masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan diberi semacam kartu ATM yang bisa digunakan untuk mengambil dana bantuan tersebut di BRI Link. Jai bantuan tersebut akan langsung diterima peserta PKH langsung dari rekening dana social yang di ambil per tiga bulan.

Hasil temuan penelitian, Masyarakat penerima bantuan PKH tidak lagi khawatir dengan biaya sekolah anak – anak mereka.Hal ini sejalan dengan tujuan dari program PKH itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan memaksimalkan pedidikan yang ditempuh.Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan memang factor dominan yang sangat menentukan usaha keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.Karena lingkaran kemiskinan yang tidak pernah lepas dari kualitas pendidikan yang rendah serta kesehatan dan memang menjadi syarat utama yang memang harus diprioritaskan untuk diatasi.

Terbukti dengan program PKH di bidang pendidikan yang memfasilitasi pembiayan pendidikan membuka semangat bagi anak – anak peserta penerima PKh untuk kembali giat dan fokus bersekolah.Karena memang sekolah adalah modal utama untuk mencetak generasi yang handal dan SDM berdaya saing.Modal utama bagi masyarakat untuk mampu bekerja lebih baik lagi dan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi.

Diharapkan dengan adanya program bantuan PKH ini membuat masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari – hari dan mampu mengupayakan peningkatan pendapatan. Dengan adanya penyuluhan dan pelatihan serta koordinasi yang baik dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah pendamping koordinator daerah dengan masyarakat diharapkan memberikan pemahaman bagi peserta PKH akan pentingnya penngkatan kualitas kehidupan, serta perbaikan kualitas pendidikan.

Disisi lain, pelaksanaan program PKH tidak hanya difokuskan pada peningkatan pemenuhan kebutuhan dan pendidikan saja tapi juga berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Dalam program PKH ini juga diprioritaskan agar masyarakat miskin bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak.Dari hasil temuan dilapangan memang diperoleh fakta bahwa hampir seluruh masyarakat RTSM di desa Seberang Taluk Hilir tidak mendapatkan layanan kesehatan yang baik akibat ketidakmampuan mereka dari segi biaya. Namun setelah diadakannya program PKH ini, masyarakat mulai difasilitasi dengan penyuluhan akan pentingkanya kesehatan, mulai fokus untuk melaksanakan dan mengikuti layanan kesehatan, masyarakat tidak takut lagi kekurangan biaya.

Terbukti dari dari hasil penelitian, masyarakat desa Seberang Taluk Hilir sudah mulai mau mengantarkan keluarga untuk berobat ke puskesmas, ibu hamil dan balita mulai mendapatkan layanan kesehatan.Masyarakat mulai meningkatkan konsumsi mereka dan menyediakan kebutuhan gizi yang lebih baik lahi bagi kesehatan.

Peran pendamping memiliki andil yang sangat besar disini. Dilihat dari latar belakang pendidikan masyarakat yang masih rendah, maka hal ini akan menyulitkan mereka dalam mengelola keuangan dengan baik sehingga bantuan pendamping dapat mengarahkan mereka dalam mengelola dana PKH agar dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Terbukti penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan PKH dinilai sudah baik, dan sesuai tugas pokoknya seperti memberikan pelayanan dan penyuluhan program PKH sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan baik jenis kegiatan PKH ini.Pelayanan yang tepat waktu dan maksimal dalam mendampingi membuat masyarakat benar – benar terbantu.

Hasil waawancara dengan pendamping PKH di desa seberang Taluk Hilir mengatakan bahwa antusiasme masyarakat untuk melakukan penyuluhan maupun diskusi selalu ada. Baik secara formal dalam forum maupun pada saat kunjungan di lapangan, banyak keluarga PKH yang aktif bertanya dan berkonsultasi dalam penggunaan dana PKH, berdiskusi dan meminta saran bagaimana pemanfaatan dana yang terbatas ini untuk mampu membantu memenuhi kebutuhan mereka. Namun kenyataannya di lapangan diperoleh bahwa masih terbatasnya relawan pendamping PKH sehingga peran pendamping harus bekerja lebih besar untuk mengayomi tiga dusun sekaligus yang ada di desa Seberang Taluk Hilir dengan jumlah peserta PKH bisa mencapai 50 keluarga.

Disini perlu adanya kebijakan dari pemerintah setempat mulai dari aparat desa, dinas social harus segera merevisi kebijakan dengan menambah jumlah peserta pendampingan PKH yang kompeten dibidangnya agar mampu menampung seluruh aspirasi dan keluhan peserta PKH secara maksimal, mampu mengarahkan dan memberikan pendampingan secara menyeluruh agar tercapai tujuan dan sasaran dari program bantuan PKH itu sendiri. Mengingat begitu besarnya peran pendamping PKH dalam menuntun peserta PKH menggunakan dana PKH secara efektif.

Hal ini sejalan dengan peran dan tugas pendamping PKH yang terangkum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Tunai Program Keluarga Harapan tahun 2019 menjelaskan peran pendamping disini adalah mampu memfasilitasi, melayani, mengayomi dan memberikan penyuluhaan kepada masyarakat penerima bantuan terkait program PKH(Kementrian Sosial, 2019). Peran pendamping memang disesuaikan dengan kemampuan dan kualitas SDM yang unggul dan memang paham betul dengan kegiatan PKH ini sehingga mampu menjawab keraguan dan ketidakpahaman masyarakat, memberikan pelatihan dan penjelasan terkait penggunaan dana PKH. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PKH secara berkala.

Dana batuan PKH yang terbatas menjadi permasalahan sendiri yang dialami oleh peserta PKH ditambah lagi rendahnya pengetahuan masyarakat akibat rendahnya kualitas pendidikan serta kesehatan yang rendah menjadikan program PKH ini berfokus pada meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai modal utama untuk menghasilkan kualitas SDM yang lebih baik diseberang Taluk hilir. Namun Setidaknya bantuan langsung ini dapat memberikan kontribusi pada pengurangan kemiskinan dalam jangka pendek(Purwanto & Makmur, 2013). Program PKH secara jangka pendek mampu memberikan kemudahan dan manfaat jangka pendek bagi penerima tetapi dapat menjadi manfaat jangka panjang jika penggunaan bantuan dari segi pendidikan dan kesehatan dimanfaatkan dengan baik.Bantuan uang kesehatan bagi ibu hamil, pelayanan kesehatan bagi balita dan anak – anak, uang pendidikan bagi anak – anak peserta PKH diharapkan akan meringankan beban masyarakat miskin di desa Seberang Taluk Hilir.

Hasill dari rangkuman responden tentang pengelolaan Dana diperoleh bahwa hampir semua peserta PKH bertanggung jawab dalam penggunaan dana PKH secara tepat. Masyarakat penerima PKH benar – benar memanfaatkan dana tersebut untuk memfasilitasi dan memudahkan proses pendidikan anak – anak mereka. Peserta tidak perlu khawatir lagi dengan biaya sekolah anak – anak mereka dengan adanya bantuan PKH di bidang pendidikan.Anak – anak peserta PKH mulai semangat lagi bersekolah tanpa ada beban.Peserta PKH mampu memenuhi segala keperluan dan perlengkapan sekolah anak – anak mereka.

Antusiasme dan harapan penerima terhadap program PKH ini adalah untuk menjadi alat pendorong bangkit dari kemiskinan. Namun dari pelaksanaannya masih perlu kebijakan lanjut dari pemerintah daerah agar program ini bisa berjalan berkelanjutan dan mampu ditingkatkan, baik dari jumlah peserta PKH maupun peningkatan jumlah dana yang diterima oleh masyarakat peserta PKH. walaupun angka kemiskinan di Kabupaten kuantang Singingi telah mengalami penurunan tapi masih belum mencapai target yang diharapkan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Seberang Taluk Hilir, kecamatan Kuantan Tengan kabupaten Kuantan Singingi telah mampu memberikan peran dan pengaruhnya dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di desa Seberang Taluk Hilir. Hal ini dapat terlihat dari perobahan dan peningkatan kualitas hidup dari masyarakat penerima bantuan PKH menjadi lebih baik lagi sesuai dengan program dan tujuan kegiatan PKH.

Keberhasilan program PKH ini terutama dapat dilihat dari fokus peningkatan kebutuhan masyarakat yang sudah mulai mampu meningkatkan taraf kebutuhannya, sudah mulai memprioritaskan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga penerima bantuan dengan adanya bantuan tunai yang memang menekankan pada perbaikan kesehatan dan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

Selain itu diperlukan tambahan staf pelaksana PKH berupa koordinator kabupaten, tenaga pendamping yang bisa langsung terjun mendampingi peserta PKH dan memberikan penyuluhan terkait pelaksanaan program PKH oleh seluruh peserta PKH. dengan meningkatnya jumlah tenaga pendamping diharapkan mampu memaksimalkan pelayanan dan penyuluhan kepada para peserta PKH yang memang membutuhkan peran pendamping.

Peran pendamping yang besar dibutuhkan dalam program PKH ini maka hendaknya pemerintah setempat juga memfasilitasi dan memudahkan proses kegiatan pendampingan seperti memberikan sarana dan prasarana pendukung bagi tenaga pendamping untuk menjangkau dengan mudah seluruh peserta PKH, memberikan insentif atau dana operasional bagi tenaga pendamping demi kelancaran kegiatan pendampingan peserta PKH

REFERENSI

Arifin, S. R., Wijaya, A., & Universitas, B. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan*. *1*(1), 21–33.

Ekardo, A., Firdaus, F., & Elfemi, N. (2014). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, *3*(1), 1–9.

Ferezagia, D. V. (2018). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia Jurnal Sosial Humaniora Terapan*. *1*, 1–6.

Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran.

Kementrian Sosial. (2019). *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program PKH*.

Purwanto, S. A., & Makmur, M. (2013). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan ( PKH ) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan ( Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto )*. *16*(2).

Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 88–92.

Surgawati, I. (2020). *Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi : Hipotesis Keynes Versus Teori Wagner*. *1*(iii).

Takaredase, Julianty Thesa ; Kaawoan, J. E., & Singkoh, F. (2019). Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng. *Jurnal Eksekutif*, *3*(3), 1–11.

Todaro, M. P. (1994). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi keempat Jilid I. In *Economic Development*.